

CEUREUMÉN

REKONSTRUKSI ACEH

NO. 31 ■ 12 OKTOBER 2006 ■ DUA MINGGUAN

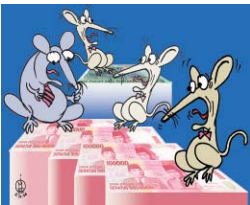
<http://e-aceh-nias.org/ceureumen/>

PANTON

Undang-undang Pemerintahan Aceh
Jinoe ka jadedh tanyoe po jeumba
Bah that tan bandum lagee tapreh-preh
Bek tepeu-eleh kana sikada
Asai ikhlas pusat ke Aceh
Geutanyoe jadedh makmu sijahtra
Bekna korupsi cue pade bijeh
Rakyat di Aceh harapan kana
Keupeue atoran sang dumpeue bereh
Meuhana jadedh jeut teuriaksana
Rakyat meutipee preh ngon thoo mareh
Trok bijeh-bijeh gob cit po atra
Mudah-mudahan bek na nyang ku'eh
Ikhlas saheh Aceh ngon Jakarta
Ube nyangka ka bekle meucungkeh
Meuplah-plah mareh hana meuguna

T.A. SAKTI

2



**Korupsi Berjamaah
di Lampoh Daya?**

3



**Menganaktirikan
Radio Komunitas**

7



**Syariat, Pilihan Cerdas
dan Tepat**

Penilaian rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca-tsunami yang menjelang dua tahun perlu diketahui publik. Dari penilaian ini, bisa didapatkan evaluasi yang menyeluruh apakah pihak-pihak terkait yang bertugas membangun kembali Aceh sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. **Baca halaman 4-5**

Menjelang Dua Tahun Bencana Tsunami



Air Payau untuk Diminum

Rahmad yd

razz_1hoks@yahoo.com
Lhokseumawe-Aceh Utara

Tarmizi (35) pria yang murah senyum. Dia biasa ditemani sepeda butut yang mengangkut dua jergen air. Tempat mangkalnya di sebuah sumber air yang cukup payau, di desa Gelanggang Baroh Aceh Utara.

Ya, Tarmizi memang berprofesi sebagai penjual air.

Kebiasaan mengangkut air itu dilakoni Tarmizi setiap harinya. Setiap pukul 15.00 sore dia sudah disana dengan menghisap dalam-dalam rokok lebel *Comandore*. Matanya yang sayu menatap ke tengah-tengah payau yang kadang-kadang berwarna keruh.

Air payau itulah yang menopang hidup Tarmizi. Selain untuk konsumsi sendiri, dia juga menjual air itu kepada warga lainnya.

Laku? Ya. Banyak orang yang

membeli meskipun rasanya cukup payau.

"Air inilah yang kami konsumsi, bukan untuk mencuci pakaian atau mandi, tapi air ini dimasak lalu diminum," katanya sambil tersenyum.

Allah maha adil, menurut Tarmizi, sekeruh apapun air payau itu ternyata tidak membuat kami dan warga terkena penyakit.

Karena konflik

Tarmizi sudah berprofesi sebagai penjual air sejak belasan tahun. Dan selama puluhan tahun pula masyarakat sekitar menggunakan air payau untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Setiap jergen saya jual Rp 2000. Setiap hari saya mendapatkan Rp 15.000. Cukup untuk makanlah," kata Tarmizi berseloroh.

Menurut pria ini, dulu pernah ada air yang dipasok PDAM. Namun karena konflik, pipa air itu di-

bangkar, entah oleh siapa. Sehingga suplai air bersih dari PDAM berhenti seketika itu juga.

Kondisi itulah yang menyebabkan masyarakat terpaksa mau tidak mau harus mengonsumsi air payau itu.

Menderita

Ke depan, Tarmizi berharap pemerintah segera membantu masyarakat. Terutama mengenai kebutuhan air. Apalagi menjelang pilkada di Aceh, banyak sekali calon kandidat yang mengunjungi desa-desa dengan sekarang janji untuk masyarakat.

"Sementara kami disini cukup menderita. Untuk minum saja, kami harus meneguk air payau, yang tidak sepatasnya dikonsumsi oleh manusia," keluh Tarmizi.

Matahari terik menyinari tubuh legam Tarmizi. Dan lelaki itu masih giat mengisi air ke jergen. Air payau untuk dijual dan diminum. ■



>> CEK BANUN



>> TAHUKAH ANDA

Kelompok-kelompok yang Mendapatkan Dana Re-Integrasi

1. GAM eks TNA
Jumlahnya 3000 orang @ Rp. 25 juta
2. Tapol/Napol
Jumlahnya 2000 orang @ Rp. 10 juta
3. Masyarakat korban konflik
Jumlahnya 63.000 orang @ Rp 10 juta
4. GAM menyerah
Jumlahnya 2.704 orang @ Rp 10 juta
5. GAM non TNA
Jumlahnya 6.200 orang @ Rp 10 juta
6. Relawan PETA
Jumlahnya 6.500 orang @ Rp 10 juta
7. Cacat fisik akibat konflik
Jumlahnya 2.000 orang @ Rp 10 juta
8. Diyat
Jumlahnya 19.500 orang @ Rp ...Tergantung qanun
9. Rumah dibakar
Jumlahnya 9.147 unit @Rp 35 juta

>> KORUPSI

Korupsi Berjamaah di Lampoh Daya?

Muhammad Azami
Banda Aceh
Muhammad2004@yahoo.com

Pada tahun 2005 P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) menganggarkan bantuan pembangunan desa untuk pembangunan infrastruktur yang hancur karena tsunami. Jumlah bantuannya sebanyak Rp 300 juta.

Kebetulan, yang beruntung tahun itu adalah Desa Lampoh Daya, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Bantuan sebesar ini dikurangkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp 120 juta, yang diperuntukkan merehab saluran drainase di desa tersebut.

Sedangkan tahap kedua sebesar Rp 180 juta, yang diperuntukkan bagi perbaikan infrastruktur lainnya.

Nah, pelaksana proyek ini adalah KERAP *Neusayang Sabee* Desa Lampoh Daya. Organisasi ini dibentuk untuk merealisasikan bantuan P2KP. Masa kerjanya terbatas, dan pengurusnya juga beberapa tokoh dan pemuda dari desa ini.

Yang menjadi soal, dari keseluruhan dana yang dikucurkan, sebagian besar tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis. Hasil investigasi

GeRAK (Gerakan Rakyat Antikorupsi) Aceh malah menunjukkan, sebagian besar dana yang disalurkan hilang dan terindikasi penyalahgunaan. Modusnya penggelapan dan korupsi secara berjamaah.

Indikasi kerugian

Dalam Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Desa Lampoh Daya tersebut, menurut GeRAK, total alokasi anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terindikasi korupsi sebesar Rp 199.990.000, dan ditambah dengan dana bantuan yang di-mark-up sebesar Rp 34.320.000.

Dalam hal apa mark-up-nya? Dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan KERAP *Neusayang Sabee*, disebutkan bahwa satu plat beton harganya Rp 5 juta, sedangkan hasil investigasi GeRAK harganya adalah Rp 2.140.000 per unitnya.

Terjadi selisih harga yang tinggi. Karena jumlah plat yang dibeli sebanyak 12 unit, maka telah terjadi mark-up dengan total dana hilang mencapai Rp 34.320.000. Selain itu, mark-up juga antara lain terjadi dalam pembelian tiga unit kereta dorong Grek Arco.

Disebutkan, harga alat itu adalah Rp 230 ribu per unit, sedang

hasil investigasi GeRAK harganya cuma Rp 180.000 per unitnya. Kereta dorong yang dibeli sebanyak tiga unit.

Sedangkan sebanyak Rp 180 juta lagi bantuan yang disalurkan melalui lembaga ini, menurut GeRAK, sebagiannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dilaporkan bahwa sebanyak Rp 120.320.000 dana yang tersisa, dari total bantuan Rp 180 juta. Namun, sisa itu juga tak dapat dipertanggungjawabkan. "Sisa dana yang tidak terpakai adalah Rp 120.320.000. Namun, dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas serta tidak ada bukti kas pengeluaran biaya bantuan yang digunakan secara jelas," kata Askhalani SHI, Ketua Divisi Monitoring dan Investigasi GeRAK Aceh.

Yang diduga terlibat

Adapun pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proyek tersebut adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek sekaligus pengawas proyek, yaitu pihak pengurus KERAP *Neusayang Sabee*.

GeRAK menilai, kasus ini menyalahi UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pi-

dana Korupsi dengan keinginan memperkaya diri pribadi dan pihak rekanan dalam melakukan pembangunan proyek bantuan dari pihak P2KP, juga dengan sengaja melakukan mark-up terhadap pembelian barang yang digunakan.

GeRAK bekerja sama dengan Komite Masyarakat Jaya Baru dan Kepala Desa Lampoh Daya beserta seluruh masyarakat menyatakan sikap sebagai berikut, "Mendesak supaya kasus ini segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum.

Pengusutan tersebut harus dilakukan secara tuntas dan transparan yang merupakan sebuah konsekuensi logis untuk mempercepat proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kota Banda Aceh."

Razali, seorang tokoh masyarakat Desa Lampoh Daya, mengatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan seluruh bukti penyelewengan itu kepada kejaksaan dalam beberapa hari mendatang. "Seluruh bukti, seperti bukti mark-up fisik maupun tanda tangan palsu akan saya laporkan kepada kejaksaan.

Masyarakat di sini meminta saya segera melapor kasus ini kepada kejaksaan," kata Razali ke-

Sebagian besar dana yang disalurkan hilang dan terindikasi penyalahgunaan. Modusnya penggelapan dan korupsi secara berjamaah.

pada *Ceureumen*, pekan lalu. Hasil musyawarah desa yang diselenggarakan pada 23 Oktober 2005 lalu pun menyatakan bahwa warga Lampoh Daya belum bisa menerima pertanggungjawaban yang disampaikan pengurus KERAP *Neusayang Sabee*.

Membantah

Sementara itu Ketua Kerap *Neusayang Sabee* Abdul Hamid yang ditanyai *Ceureumen* mengatakan, semua tuduhan GeRAK maupun Razali tidaklah benar. Pihaknya juga mempersilakan kalau ada yang tidak puas dan ingin menempuh jalur hukum.

Menurutnya, BPKP pun sudah melakukan pemeriksaan atas berbagai proyek yang dikerjakan pihaknya. "Tidak ada masalah lagi. Soalnya, BPKP pun telah melakukan pemeriksaan," kata pria ini saat ditemui di *Ceureumen* rumahnya, Minggu (8/10) lalu. ■

Menganaktirikan Radio Komunitas

Firman Hadi

Banda Aceh
besi_patah@yahoo.com

Belakangan ini Radio Komunitas Suara Perempuan terlihat sepi. Tidak ada tanda-tanda aktivitas di sana, layaknya sebuah radio yang aktif. Padahal sebelumnya radio tersebut pernah menghiasi udara di kota Banda Aceh untuk beberapa waktu.

Hanya sesekali saja pintu depan radio yang berada di jalan T.Nyak Makam, Banda Aceh, itu terlihat terbuka. Saat dikunjungi Ceureumen Rabu pekan lalu, hanya terlihat seorang wanita muda yang sedang membuka pintu radio. Wanita itu tidak lain adalah Ita, pihak manajemen dari Radio Komunitas Suara yang sudah nonaktif itu. "Radio ini sudah disegel untuk sementara oleh Balmon (Balai Monitoring) sejak 12 Juli lalu, karena belum mendapatkan izin," kata Ita.

Ita bercerita, radio ini sudah pernah mengudara sejak pertengahan tahun 2005 yang lalu. Namun, pada saat itu masih dalam tahap percobaan sambil menunggu keluarnya izin. Karena izin siaran tak kunjung diperoleh, radio

ini dinonaktifkan oleh Balmon.

Optimis

Begitupun, tampaknya Ita tidak mau radio ini menghilang begitu saja, karena pernah mengudara dan memikat banyak pendengar. Dia optimis radio ini bakal mengudara kembali, walaupun jalan untuk itu teras sulit. Menurut perempuan yang pernah bekerja pada Radio 68H Jakarta ini, pihaknya kini sedang mengusahakan izin baru. "Kelihatannya sudah menampakkan titik terang untuk izin siaran," ujarnya, optimis. Dia yakin, dalam waktu dekat ini Radio Komunitas Suara Perempuan akan kembali menghiasi udara kota Banda Aceh.

Syarat dibuat-buat

Radio Komunitas adalah sebuah media penyiaran yang berasal dari komunitas, diselenggarakan dan diperuntukkan bagi komunitas yang bersangkutan. Di Aceh, membangun sebuah Radio Komunitas terasa sangatlah sulit.

Pasalnya, menurut Ita, KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kominfo belum menetapkan syarat perizinan mendirikan Radio Komunitas. Hal ini diperparah dengan adanya

syarat-syarat yang terkesan senggaja ditambah-tambah. "Syarat tambahan dari KPID terlalu dibuat-buat," kata Ita. Mereka memang meminta SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), dan lain-lain. Padahal, menurut Ita, Radio Komunitas bukanlah radio komersil. Syarat lainnya yang sangat memberatkan adalah KPID meminta akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. "Masih banyak syarat-syarat lain yang terasa memberatkan," tambah Ita.

Kondisi ini terang saja membuat Radio Komunitas seolah-olah dianaktirikan dalam mendapatkan izin siaran. Dan tampaknya bukan hanya Radio Komunitas Suara Perempuan saja yang sedang berusaha mendapatkan izin siaran. Radio-radio baru lainnya yang berbentuk komunitas, seperti Seha FM dan Radio di IAIN juga sedang berusaha memperoleh izin siaran dari KPID.

Prosesnya belum transparan

Menyikapi sulitnya Radio Komunitas memperoleh izin siaran, seorang praktisi radio bernama Agus mengatakan, berbelit-belitnya aturan memperoleh izin disebabkan prosedurnya yang



■ HOTEL SIMANJUNTAK

belum transparan. Menurut Agus yang pernah bekerja di AIR.Net (Aceh Emergency Radio Network), sosialisasi berbagai aturan tersebut selama ini juga belum transparan. "Akibatnya, ya seperti yang dirasakan oleh beberapa radio baru di kota Banda Aceh sekarang," ujar Agus.

Sementara itu, Fasilitator Pengembangan Radio Kabupaten dari ARR.Net, Sarwono, berharap agar proses perizinan bagi Radio Komunitas janganlah dipersulit.

"Kalau bisa, Radio Komunitas dibangun untuk bisa berkembang," kata Sarwono. Pria asal Yogyakarta ini beralan bahwa Radio Komunitas itu lebih dekat dengan masyarakat dan manfaatnya lebih kompleks dari sekadar hitungan ekonomi. Selain itu, tambah Sarwono, Radio Komunitas juga berguna untuk mempercepat arus informasi bagi masyarakat guna mendukung proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh sekarang ini. ■

KIPD : Kami tidak Mempersulit

Muhammad Azami

Banda Aceh
Muhammad2004@yahoo.com

Ketua KPID Provinsi NAD Dr Iskandar A. Gani SH MH mengatakan, pihaknya tidaklah mempersulit perizinan. KPID hanya menjalankan aturan yang ada. Kalau saja sebuah Radio Komunitas yang mengajukan izin mengikuti setiap tahapan memperoleh izin secara terus menerus, paling lama izin akan keluar dalam waktu 2,5 bulan. Kebanyakan, katanya, setelah menyerahkan berkas, pemohonnya tidak *nongol-nongol* lagi. Padahal, kebanyakan pemohon tak melengkapi semua persyaratan yang diminta. "Kita kadang tidak tahu harus menghubungi kemana untuk meminta persyaratan dilengkapi," jelas Iskandar.

Tidak mengada-ada

Kalau pun pihaknya meminta akta pengesahan dari Menteri

Hukum dan HAM, Iskandar menilai itu sebagai perintah undang-undang. "Itu semua diatur dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP No. 51 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas," jelasnya.

Menurutnya, semua Radio Komunitas yang hendak mengudara memang harus mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari KPID. Sayangnya, hingga kini baru satu Radio Komunitas yang mengajukan izin dan hampir rampung prosesnya, yaitu Radio Suara Perempuan. Belum ada satu pun Radio Komunitas lain yang mengajukan izin atau telah diberi izin siaran. Padahal, menurut Iskandar, jumlah Radio Komunitas di Aceh puluhan jumlahnya.

Perketat menjelang Pilkada

Iskandar tak memungkirinya bahwa ada saja Radio Komunitas ilegal yang mengudara selama ini. Mereka tentu saja tanpa izin atau

ilegal. Itu sebabnya, katanya, KPID bekerjasama dengan polisi dan Panwaslu akan memantau secara ketat aktivitas radio ilegal itu. "Apalagi kalau radio itu menyuarakan kampanye kandidat Pilkada, itu pelanggaran," jelasnya.

Tidak untuk kepentingan asing

Iskandar juga menjelaskan beberapa syarat untuk memperoleh izin dari KPID. Syarat-syarat itu antara lain: SITU, SIUP, juga studi kelayakan bisnis. Kebanyakan pemohon tidak memuat studi kelayakan bisnis secara lengkap. "Misalnya, harus jelas siapa pemilik saham, siapa pangsa pasarnya.

Dari mana sumber dananya. Ini untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jangan seminggu siaran sudah tutup. Selain itu, juga tidak digunakan untuk kepentingan asing," jelasnya. ■

Apa Itu Radio Komunitas?

Muhammad Azami

Banda Aceh
Muhammad2004@yahoo.com

Radio Komunitas adalah sebuah media penyiaran yang berasal dari komunitas, diselenggarakan dan diperuntukkan bagi komunitas. Operasionalisasinya menggunakan frekuensi radio.

Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Aceh, kini muncul kebutuhan di kalangan komunitas-komunitas kecil di tingkat kampung atau desa, maupun kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan, seperti pedagang kecil, petani, buruh, untuk sekadar bertukar informasi atau gagasan, menyebarluaskan berbagai bentuk ekspresi kesenian yang tidak tertampung dalam media-media komersial.

Kini, Radio Komunitas yang lahir pun beraneka ragam. Ada radio kampung, radio petani, radio buruh pabrik, radio buruh perkebunan, radio pedagang pasar, radio kampus, maupun radio kesenian. ■

■ REDAKSI CEUREUMeN ■



Pemimpin Redaksi: Sim Kok Eng Amy ■ **Sekretaris Redaksi:** Siti Rahmah ■ **Redaktur/Wartawan:** Nani Afrida, Mohammad Avicenna, Muhammad Azami ■ **Koordinator Artistik:** Maha Studio ■ **Fotografer:** Hotli Simanjuntak ■ **Bagian Keuangan:** Atik Hidayati ■ **Bagian Umum:** Ratnasari Dewi, Andi Yoga Tama ■ **Bagian Sirkulasi:** Surya Windu ■ Dengan kontribusi wartawan lepas di Aceh ■ **Alamat:** Jl. Prada Utama No: 11 A. Gampong Prada, Banda Aceh. PO BOX 061 Banda Aceh 23001. Email: ceureumen@gmail.com ■ Percetakan dan distribusi oleh *Serambi Indonesia*.

CEUREUMeN merupakan media dwi-mingguan yang didanai dan dikeluarkan oleh Decentralization Support Facility (DSF atau Fasilitas Pendukung Desentralisasi). DSF merupakan inisiatif multi-donor yang dirancang untuk mendukung kebijakan desentralisasi pemerintah dengan meningkatkan kesadaran dan efektifitas dukungan dari para donor pada setiap tingkatan pemerintahan. Misi dari CEUREUMeN adalah untuk memberikan informasi di Aceh tentang rekonstruksi dan berita yang bersifat kemanusiaan. Selain itu CEUREUMeN diharap bisa memfasilitasi informasi antara komunitas negara donor atau LSM dengan masyarakat lokal.

>> SUARA RAKYAT KECIL

Pengungsi Juga Butuh Informasi dan Hiburan

Sudah delapan bulan lebih musibah tsunami menghantam daerah kita. Cobaan itu semoga menjadi itibar kepada kita umat beragama. Dan kepada pemerintah juga hendaknya ini dijadikan suatu cobaan, sehingga dalam mengelola negeri menjadi lebih baik lagi tanpa korupsi.

Saya mewakili warga Kemukiman Lhoong, Aceh Besar melalui Tabloid Ceureumén ini ingin menumpahkan sedikit uneg-uneg yang sudah lama terpendam kepada pemerintah atau BRR.

Terus terang, kami di Lhoong sudah boleh dikatakan bagaikan warga yang hidup dipelosok negeri nun jauh dari pusat pemerintahan. Apa yang terjadi di Banda Aceh, Jakarta atau dunia misalnya, tidak semua warga mengetahui. Singkat kata, lembaran informasi kami sudah gelap gelita.

Untuk itu, kami mohon kepada instansi atau lembaga terkait supaya menghibahkan bantuan beberapa unit televisi untuk Kemukiman Blang Mee plus parabola sekalian. Sebab tanpa parabola, televisi juga tidak bisa difungsikan.

Bantuan tersebut selanjutnya bisa di tempatkan disetiap kantor desa setempat. Sebagai informasi, Kemukiman Blang Mee terdapat lima desa yakni, Desa Teungoh, Lamkuta, Umong Siribe, Teungoh Geunteuet dan Desa Baroh Geunteuet.

Terima kasih atas perhatiannya.

Esha Kurnia
Desa Baroh Blang Mee,
Kecamatan Lhoong, Aceh Besar

Hormati Syariat Islam

Kalau tidak salah saya beberapa waktu lalu, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh dan Nias mengumumkan bahwa untuk rekon tahun depan ini butuh sebanyak 1,5 juta pekerja.

Ini tentu saja sebuah jumlah yang tidak sedikit. Kita sambut dengan tangan terbuka banyaknya rekan-rekan kita yang datang dari luar daerah mencari kerja di Aceh. Sungguh ini tak pernah terbayang sebelumnya. Apalagi sejak dulu banyak rakyat Aceh yang mencari kerja di luar daerah hingga luar negeri.

Kini semuanya terbalik, seperti tsunami yang sudah membalikkan semuanya. Karena itu, kepada para pendatang dan pekerja kemanusiaan yang sudah masuk ke Aceh agar menghargai betul budaya di sini. Jangan anda membuka peluang maksiat di Aceh.

Kami yakin semua musibah itu adalah cobaan Allah kepada hambanya yang sudah mengukar. Salah satunya ya, mungkin kita kita sudah mengingkari perintah Sang Khalik. Karenanya, kedatangan anda-anda jangan malah menambah keangkara-murkaan Tuhan. Makanya segera hentikan maksiat. Terimakasih untuk *Ceureumén* yang sudah memuat uneg-uneg saya ini.

Isa Abdullah
Beurawe Kuta Alam
Banda Aceh

Buat Anda yang ingin menyampaikan *Suara Rakyat kecil* berupa ide, saran, dan kritik tentang rekonstruksi bisa melalui surat ke

Tabloid CEUREUMEN
PO Box 061 Banda Aceh 23001
email: ceureumen@gmail.com

Tabloid *Ceureumén* membuka rubrik "Komentar Anda". Rubrik ini mengundang partisipasi pembaca untuk memberi komentar terkait dengan topik yang akan kita bahas per edisi.

"Komentar Anda" akan hadir setiap dua edisi atau setiap edisi bernomor genap *Ceureumén*. Anda bisa mengirim pendapat ke nomor 081377237728 dengan menulis komentar_isi komentar Anda, serta alamat tempat tinggal Anda. Komentar Anda bisa juga dikirim melalui email: ceureumen@gmail.com, atau lewat surat ke PO Box 061 Banda Aceh 23001.



FOTO: FOTO: HOTEL SWANJUNTAH

Empat orang pekerja sedang berpose di depan mesin pengaduk saat beristirahat membangun rumah bagi korban tsunami di Desa Alue Naga Banda Aceh. Setelah dua tahun proses rekonstruksi berjalan, masih banyak masalah yang harus diselesaikan pelaku rekonstruksi Aceh dan Nias.

Menjelang Dua Tahun Bencana Tsunami Kordinasi Masih Masalah

Dina Damayanti

Banda Aceh
Dina_yanti01@yahoo.com

Penilaian rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca-tsunami yang menjelang dua tahun perlu diketahui publik—baca: terutama korban tsunami.

Dari penilaian ini, bisa didapatkan evaluasi yang menyeluruh apakah pihak-pihak terkait yang bertugas membangun kembali Aceh sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dan kalau pun belum, bisa diketahui pasti yang mana yang harus ditingkatkan. Dan untuk inilah dilakukan ARRA.

ARRA adalah program penilaian rehabilitasi dan rekonstruksi. Program ini sudah dilaksanakan sebanyak dua kali. Yang melakukan survey adalah tim fakultas hukum Universitas Syiah Kuala, Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPK). dan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikul Saleh. Di lima kabupaten/Kota.

Studi ini juga melakukan diskusi dan wawancara dengan 1034 responden, 70% di antaranya adalah korban tsunami sementara sisanya berasal dari kelompok pemerintah, legislatif, lembaga non pemerintah lokal, nasional dan internasional. Tim ARRA merancang dan melaksanakan program ini bekerjasama dengan *The Asia Foundation* yang didukung oleh *Give2Asia*.

Tetap masalah kordinasi

ARRA putaran pertama menemukan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pada rentang tersebut telah mulai berjalan, namun koordinasi diantara para penyedia layanan atau bantuan masih belum berlangsung dengan baik.

Peran BRR dan pemerintah daerah yang seharusnya me-

megang peran tersebut masih belum berjalan. Akibatnya terjadi penumpukan bantuan/layanan di satu tempat, sebaliknya di tempat lain berlangsung kekurangan bantuan/layanan.

Beberapa permasalahan yang pada ARRA 1 ditemukan sebagai penghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, masih ditemukan pada ARRA 2. Salah satu permasalahan mendasar yang masih ditemukan adalah persoalan koordinasi antara para pihak penyedia layanan yang masih belum memiliki pola baku yang standar.

Empat hal

Sedangkan ARRA putaran kedua Menitik beratkan pada empat hal yaitu kinerja pemberian layanan di bidang kesehatan dan pendidikan, perumahan dan infrastruktur, dokumen kepemilikan dan harta benda, serta pemulihan ekonomi. Inilah hasilnya.

Perumahan dan Infrastuktur

Kemajuan

- Pelayanan rehabilitasi perumahan dan infrastruktur yang sudah dilaksanakan meliputi perbaikan dan pembangunan: rumah, jalan, jembatan, fasilitas publik dan kantor-kantor pemerintahan, dan lain-lain.
- Pengungsi yang menempati barak sudah kembali ke rumahnya
- Banyak pembangunan infrastruktur yang menyertakan masyarakat dalam menentukan model dan bahannya.

Masalah:

- Pemberi pelayanan di bidang perumahan dan infrastruktur masih tertutup
- Masih banyak pengungsi yang belum bisa

dihasilkan rumah karena tidak tersedianya tanah. Hal ini terjadi bagi masyarakat yang sebelum tsunami berstatus sebagai penyewa. Juga bagi korban tsunami yang tanahnya abrasi dan harus direlokasi.

- Kendala pembangunan rumah yang bervariasi. Misalnya soal terbatasnya material, kekurangan tenaga kerja, tidak tersedianya lahan.
- Pembangunan rumah yang berbeda-beda kerap menimbulkan kecemburuan. Namun pemberi bantuan mengalami persoalan untuk menyamaratakan bantuan karena dana mereka yang berbeda-beda.
- Banyak rumah yang dibangun tidak memiliki standar minimum penyediaan prasarana pendukung, seperti toilet, air bersih, atau jaringan listrik.

- Pembangunan perumahan dan infrastruktur sangat buruk kualitas dan jumlahnya yang masih minim menyebabkan banyak korban tsunami yang protes.
- Sulitnya bagi publik dan pemberi layanan untuk mengakses jumlah dana untuk program perumahan dan infrastruktur
- Tidak adanya mekanisme pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan apakah bantuan rumah sudah sesuai dengan hak mereka.

Kabupaten	Rencana rumah yang akan di bangun	Realisasi Pembangunan	Dalam Proses	Sisa dari rencana
1. Aceh Barat	14.384	1.539	1.873	11.372
2. Aceh Besar	18.901	4.366	1.812	12723
3. Aceh Utara	6.000	1.337	2.600	2.063
4. Bireuen	6.300	2.300	1.360	2.540
5. Banda Aceh	8.371	1.476	n.a	6.895

Rekomendasi untuk Perumahan dan Infrastruktur

- Pemerintah/BRR perlu berperan aktif dalam mengontrol ketersediaan materil dan harga dari material yang dibutuhkan sehingga pembangunan rumah dan infrastruktur menjadi lancar. Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat proses pencairan dana untuk pembebasan lahan dan pembangunan perumahan maupun infrastruktur.
- Para pemberi layanan dapat menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penerapan mekanisme monitoring dan pengaduan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, selain juga penerapan kebijakan yang mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan yang dilaksanakan.
- Pemerintah/BRR hendaknya mengeluarkan kebijakan standar minimal dalam penyediaan prasarana pendukung agar dapat menjadi acuan bagi lembaga-lembaga pemberi bantuan layanan perumahan dalam meminimalisasi kecemburuan di masyarakat.



Kami sebelum tsunami mengontrak rumah. Dan kabarnya kami tidak jadi dibangun rumah karena tidak memiliki tanah. Apa yang akan terjadi pada kami? Entahlah. Saya pasrah.

SYARIFAH (36) PENGUNGSI TINGGAL DI BARAK



Pelayanan Dokumen Kepemilikan dan Harta Benda

- Terdapat banyak bantuan khusus untuk pelayanan dokumen kepemilikan dan harta benda. Misalnya bantuan penggantian fasilitas seperti komputer, mesin ketik, kertas dokumen dan mesin fotokopi
 - Tersedia program pelayanan sertifikasi tanah secara gratis yang diberikan kepada korban tsunami. Program ini dikenal dengan RALAS (*Reconstruction of Aceh Land Administration System*).
- Kemajuan**
- Terdapat banyak bantuan khusus untuk pelayanan dokumen kepemilikan dan harta benda. Misalnya bantuan penggantian fasilitas seperti komputer, mesin ketik, kertas dokumen dan mesin fotokopi
 - Tersedia program pelayanan sertifikasi tanah secara gratis yang diberikan kepada korban tsunami. Program ini dikenal dengan RALAS (*Reconstruction of Aceh Land Administration System*).
- Masalah**
- Pemberian sertifikasi melalui program RALAS belum dapat terlaksana, akibat belum ada aturan hukum yang dapat menjadi dasar untuk penetapannya agar tidak terjadi sertifikasi ganda dan konflik di kemudian hari.
 - Informasi soal sertifikasi masih sangat sedikit ke masyarakat. Baik soal waktu, biaya dan lain-lain menyebabkan masyarakat akhirnya tidak jadi mengurus.
- 3. Pelayanan Penetapan Ahli Waris**
- Masalah**
- Mahkamah Syar'iyah tidak memiliki cukup tenaga hakim dan panitera. Serta ruang sidang yang tidak memadai.
- Rekomendasi di bidang pelayanan dokumen kepemilikan**
- Penyedia layanan hendaknya dapat menyusun standar pelayanan minimal, yang berisikan jaminan waktu, rangkaian waktu dan pembebanan biaya untuk pengurusan dokumen yang menjadi tanggungjawabnya. Hal ini dapat pula ditindaklanjuti dengan pembentukan sistem pelayanan terpadu satu atap agar mempermudah masyarakat.
 - Pemerintah pusat agar segera membuat kebijakan yang dapat menjadi pijakan hukum bagi sertifikat pengganti dari sertifikat yang hilang akibat terjadinya Tsunami. Hingga saat ini, tidak jelas perkembangan dari rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undangan (Perpu) untuk menanggulangi konflik tanah yang terjadi akibat gempa dan tsunami di Aceh dan Nias, Sumatera Utara yang pernah diinisiasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

1. Pelayanan Sertifikasi Tanah

- Masalah**
- Pemberian sertifikasi melalui program RALAS belum dapat terlaksana, akibat belum ada aturan hukum yang dapat menjadi dasar untuk penetapannya agar tidak terjadi sertifikasi ganda dan konflik di kemudian hari.
 - Informasi soal sertifikasi masih sangat sedikit ke masyarakat. Baik soal waktu, biaya dan lain-lain menyebabkan masyarakat akhirnya tidak jadi mengurus.

2. Pelayanan KTP

- Masalah**
- proses pembuatan KTP Nasional ini mengalami keterlambatan dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kamera. Sampai saat ini, dalam proses pemotretan untuk pem-

Pelayanan Kesehatan dan Bidang Pendidikan

- Kemajuan**
- Umumnya di setiap daerah sudah terjadi rekonstruksi fasilitas kesehatan dan sekolah pasca bencana tsunami.
- Masalah**
- Pelayanan kesehatan masih sangat buruk dan dikeluhkan masyarakat.
 - Di beberapa kabupaten, masyarakat sulit menjangkau pelayanan kesehatan karena jarak yang cukup jauh.
 - Tidak ada posko khusus pengaduan baik masalah kesehatan maupun masalah pendidikan.
- Rekomendasi**
- Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan hendaknya mengeluarkan regulasi mengenai standar pelayanan minimum yang disediakan oleh Puskesmas dan Puskesmas Keliling, sehingga masyarakat menjadi lebih paham dan tidak berekspektasi yang berlebihan atas layanan yang akan diterimanya di kedua fasilitas pemulihan kesehatan dasar tersebut.
 - Lembaga pemberi bantuan di bidang pendidikan hendaknya juga memberikan dukungan kepada dayah, baik menyangkut bantuan operasional maupun dukungan peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pada dayah-dayah yang menampung anak yatim piatu korban Tsunami.

Pelayanan Pemulihan Ekonomi

- Kemajuan**
- Jumlah penerima bantuan pemulihan ekonomi bertambah
 - Berbagai ragam pemberian bantuan di bidang pemulihan ekonomi misalnya di bidang perikanan, peternakan, pertanian, dan bantuan modal untuk usaha kecil dan ekonomi mikro.
- Masalah**
- Masih tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja.
 - Tidak ada jaminan keberlanjutan dari program ekonomi yang diberikan
 - Di beberapa tempat penyaluran bantuan ekonomi lebih kepada orang-orang yang dekat dengan elit desa atau penyalur bantuan.
 - Pendistribusian bantuan belum mengakomodir kebutuhan masyarakat secara maksimal dan hanya untuk korban tsunami.
 - Bantuan perekonomian masih terfokus kepada laki-laki
 - Tidak adanya pos pengaduan khusus soal masukan dan keluhan masyarakat menyangkut bantuan ekonomi
- REKOMENDASI**
- Pemerintah, khususnya BRR, harus melakukan eksekusi terhadap segala penyimpangan dan mis-manajemen yang terjadi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - Lembaga pemberi bantuan pemulihan ekonomi dan pemerintah hendaknya melakukan reorientasi dari penerima manfaat bantuannya, yang diharapkan dapat mengakomodasi masyarakat di luar korban tsunami, seperti masyarakat miskin dan/ atau korban konflik
 - Lembaga pemberi bantuan dan institusi pemerintah yang hendak melakukan program pemulihan ekonomi sebaiknya mendahulukan perencanaan kegiatan secara bersama dengan kelompok masyarakat dalam menentukan: siapa yang akan menerima bantuan, jenis bantuan yang dibutuhkan serta pola perguliran bantuan.



Seorang wanita penghuni tenda sedang memasak di dalam tenda yang sempit. Menjelang dua tahun proses rekonstruksi Aceh, masih banyak masalah yang mesti dibarengi oleh pelaku rekonstruksi.



Ikan teri merupakan jenis makanan yang mudah didapatkan di pasar-pasar ikan. Dari ikan jenis ini bisa dibuat berbagai penganan yang lezat. Salah satunya adalah Teri Pepes tanpa Tulang, kiriman Ibu Zulhaini. Selamat mencoba



Teri Pepes Tanpa Tulang

Bahan:

- ½ kilogram Teri Segar
- 2 Siung Bawang Putih
- 3 siung Bawang Merah
- 20 buah Cabe rawit
- 15 buah Asam Sunti
- 6 buah Belimbing Sayur
- 1 sdm Kunyit

- 3 sdm Minyak Makan
- Daun Kemangi secukupnya
- Garam secukupnya
- Daun Pisang untuk membungkus

Cara memasak:

- Teri segar dibersihkan dan

- dibuang tulangnya
- Belimbing sayur diiris serong
- Bawang putih, bawang merah, cabe rawit, dan asam sunti dihaluskan
- selanjutnya ditambahkan minyak makan, kunyit, garam, daun kemangi, dan belimbing sayur yang telah diiris, aduk rata
- Lalu masukkan teri yang telah dibersihkan, aduk rata dan diamkan beberapa menit
- Selanjutnya dibungkus dengan daun pisang
- Selanjutnya di panggang diatas panggangan dengan api kecil sampai matang.

Bagi Anda yang memiliki resep unik yang bisa dimasak dengan mudah dan enak, bisa mengirim surat ke **PO BOX 061 Banda Aceh 23001**. Email: ceureumen@gmail.com. Cantumkan alamat lengkap. *Ceureumen* akan mengunjungi Anda dan melihat Anda memasak. Disediakan bingkisan kecil untuk Anda.

>> TIPS

Sahur yang Sehat

Memang sebagian dari kita malas saat makan sahur, karena biasanya saat jam itu kita terlelap tidur. Lagian lambung tak terbiasa menggunakan enzim pencernaan. Karena itu agar sahur sukses usahakan:

1. Makan hangat

Tujuannya tak lain agar makanan mudah dicerna sekaligus merangsang keluarnya enzim pencernaan

2. Porsi cukup

Jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Sahur ini sebagai pengganti sarapan, untuk mencukupi kebutuhan energi sepanjang hari. Usahakan gizi seimbang, cukup protein untuk menjaga kadar gula darah selalu dalam kondisi normal. Makan perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit agar lambung terisi dengan baik.

3. Sayur dan buah

Sayur dan buah sebagai

sumber vitamin dan mineral yang baik untuk menjaga daya tahan dan kebugaran tubuh. Makanan ini juga kaya serat sehingga perut akan terasa kenyang dalam waktu lama. Dianjurkan mengonsumsi sayur dan buah yang kaya vitamin A, B, C dan E.

4. Susu

Jangan lupa tutup sahur dengan segelas susu sehingga tubuh akan memperoleh asupan gizi yang lengkap untuk aktivitas sepanjang hari

5. Jangan minum kopi

Kopi tergolong diuretik yang akan menyebabkan cairan tubuh sering keluar, makanya hindari meminumnya saat sahur



REPRO PRODUEN

6. Solusi mi instan

Kalau terlambat bangun dan hanya sempat merebus mie instan, usahakan menambahnya dengan telur dan sayuran atau daging.

7. Segelas jus

Akhiri dengan segelas jus, jika tak sempat mengunyah buah.

8. Jangan lupa multivitamin

Sertakan juga suplemen multivitamin, jika Anda cemas makan yang dikonsumsi kurang bergizi. ■

>>> TANYA JAWAB

Memastikan Pemilih Terdaftar

Seperti sering disebutkan bahwa Pilkada yang akan berlangsung mendatang di Aceh merupakan Pilkada terbesar di Indonesia. Hal itu karena Pilkada kali ini dilaksanakan untuk memilih calon gubernur/wakil gubernur dan memilih bupati/wakil bupati dari 21 Kabupaten/Kota.

Namun, saya sendiri belum tahu apakah saya sudah terdaftar oleh Keuchik di desa saya sebagai pemilih. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah terdaftar sebagai pemilih di desa saya? Apakah saya harus melaporinya terlebih dahulu? Terima kasih atas jawabannya.

Sarjani Sulaiman,
Luengbata Banda Aceh

Menurut petunjuk yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pilkada atau KIP (Komisi Independen Pemilihan), cara untuk mengetahui dan memastikan kita sudah terdaftar, yaitu dengan mengecek nama Anda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan oleh PPG dan dipasang di Gampong/Kelurahan atau tempat-tempat strategis lainnya.

Jika nama Anda tidak tercantum atau ada kesalahan pada penulisan nama atau identitas lain, segera ajukan perbaikan kepada petugas Pendaftaran Pemilih (P2P) di Gampong/Kelurahan setempat. Pemilih dapat mendaftarkan diri secara aktif kepada P2P di Gampong/Kelurahan setempat mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2006.

Jika sudah mendaftar, Anda akan mendapat tanda bukti terdaftar sebagai pemilih untuk ditukarkan dengan kartu undangan setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan di Gampong/Kelurahan. Kartu undangan akan diterima selambat-lambatnya tiga hari sebelum pemungutan suara.

Jika sampai batas waktu terakhir petugas PPG belum mendaftarkan kediaman Anda untuk menyerahkan kartu undangan, segera lapor ke PPG.

Ambulan Gratis?

Kami bertempat tinggal jauh dari rumah sakit. Bila ada yang sakit pada malam hari, kami terpaksa mencari kendaraan untuk membawa pasien ke rumah sakit. Dan sewanya cukup mahal. Dapatkah kami mendapatkan fasilitas ambulan secara gratis?

Nela
Krueng Raya Banda Aceh

Anda bisa menghubungi nomer telepon 0651- 188 untuk meminta bantuan ambulan PMI untuk penyakit-penyakit gawat.

Anda bisa mengirimkan pertanyaan apa pun yang ingin Anda ketahui, terutama mengenai masalah rekonstruksi dan rehabilitasi. Redaksi akan mencari jawaban untuk pertanyaan Anda. Kirimkan ke **PO BOX 061 Banda Aceh 23001** atau email ceureumen@gmail.com dengan mencantumkan "Rubrik Tanya Jawab"



TEKA TEKI SILANG CEUREUMEN No. 31

1	2		3		4	
					5	6
			7			
8					9	10
					11	
			12	13		
14						
			15			

Mendatar:

1. Dulang tempat hidangan dalam upacara (aceh)
5. Udang Kering
7. Uang yang disediakan untuk tujuan tertentu
8. Danau (Inggris)
9. Dinas Rahasia Amerika Serikat
11. Hadir
12. Bunyi yang menyerupai angina kencang
14. Tira
15. Sifatnya selalu berubah-ubah

Menurun:

2. Patung dari batu dan ben-

- tuknya seperti manusia
3. Peralatan Mesin/Mobil
4. Tak henti-hentinya
6. Batu permata yang berwarna berbagai jenis
8. Pengantin Pria (Aceh)
10. Tanda Nomor Kendaraan Magelang
13. Masa, Zaman

Pemenang Ceureumén edisi 27

1. Siti Fatimah Guru SMU Neg. 1, Lawe Alas Ngeran Kuta Cane, Aceh Tenggara.
2. Tuwah Yoga Prakoso Siswa Min, kelas: IV B MIN. Kota Cane, Aceh Tenggara.
3. Rita Afrida Jl. Sultan Iskandar Muda No: 3. Dinas Peternakan. Banda Aceh
4. Ismi Fadillah Guru B. Inggris MTS. Keutapang II Jln. Hadiah No: 4 A Banda Aceh.

Pengumuman pemenang TTS akan diumumkan setiap dua edisi berikutnya. Jawaban di kirim ke Po.Box 061 Banda Aceh. Kepada 5 (lima) pemenang akan mendapatkan kamus Bahasa Indonesia-Inggris.

Syariat, Pilihan Cerdas dan Tepat

Drs. Wahyu Rahman

Proses pemberlakuan secara resmi Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam “diraih” dengan sebuah proses panjang dengan berbagai pengorbanan. Dengan kata lain bukanlah produk sejarah yang telah rampung, tapi merupakan proses yang berkelanjutan.

Diawali sejak 1948 oleh Abu Beure’eh selaku Residen pada saat itu menyampaikan kepada Presiden Soekarno yang berkunjung ke Aceh tentang keinginan masyarakat Aceh untuk menjadikan Syariat Islam secara *kaffah* tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi dan masyarakat, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dan pada tahun itulah terbentuk Mahkamah Syar’iyah untuk pertama kalinya di Aceh. Sembilan tahun kemudian yakni pada 1957 pemerintah kembali membentuk Mahkamah Syar’iyah sebagai kelanjutan dari Mahkamah Syar’iyah yang dibentuk pada tahun 1948.

Kehadiran Mr.Hardi selaku Ketua Delegasi Pemerintah Pusat untuk melakukan perundingan dengan gerakan Darul Islam pada

1959, dan hasilnya memberikan tiga keistimewaan kepada Aceh, yakni; *di bidang agama, pendidikan, adat (peradatan)*. Tiga keistimewaan ini intinya adalah Pelaksanaan Syariat Islam dalam tiga bidang tersebut.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 menjadi pelaksana dari keistimewaan yang diberikan pemerintah pusat pada 1959 dan ditambah satu keistimewaan lagi berupa, keterlibatan ulama dalam pembuatan kebijakan daerah. Kemudian lahir lagi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh, sebagai penjabaran dari ketetapan MPR yang dikuatkan oleh Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Di mana salah satu isinya adalah Pembentukan Mahkamah Syar’iyah Islam sebagai bagian Hukum Nasional.

Maka jelaslah bahwa Syariat Islam di Aceh merupakan pilihan masyarakat bukan hadiah ataupun pemberian Pemerintah Pusat. Sebagaimana kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah pemberian dari Belanda, namun berkat perjuangan dan doa rakyat Indonesia.

Syariat punya cita-cita yang agung; untuk lahirnya masyarakat



■ HOTEL SIBANGUNYAK

yang bebas. Sebuah masyarakat yang mampu menentukan nasib sendiri dan menguasai sumber dayanya sendiri. Jika sebuah masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memanfaatkan dan menggunakan sumber-sumber daya, maka masyarakat tersebut tidak dapat mendistribusikan sumber daya secara merata, dan menegakkan keadilan sosial dan ekonomi.

“Sumber dasar Syariat adalah Al-Qur’an, sunnah, Ijma atau consensus para ulama, dan Qiyas atau pemikiran analogis. Para ahli Fiqih juga mengembangkan sejumlah sumber pelengkap bagi Syariat, terutama al-istishlah atau kepentingan umum, dan al-urf atau adat kebiasaan masyarakat”. (Baca: *Muhammad For Beginners*,

karya Ziauddin Sardar dan Zafar Abbas Malik).

Syariat tidak diskriminatif Bukti bahwa syariat sangat akomodatif terhadap keberagaman paham dan adat istiadat, serta agama

yang dianut dalam masyarakat. “Dalam sejarah dapat dilihat bahwa Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan Yahudi, Kristen dan lainnya, membangun sebuah negara-kota di Madinah dan membuat konstitusi tertulis atas persetujuan bersama.

Konstitusi tersebut mengakui kebebasan beragama, meletakkan prinsip-prinsip pertahanan, kebijakan luar negeri, dan jaminan sosial. Konstitusi tersebut juga menjalin persahabatan dan perjanjian dengan suku-suku yang tinggal di sekitar Madinah. Inilah konstitusi yang paling kompromistis sepanjang sejarah”. (Baca: *Sejarah Hidup Muhammad karya Syaikh Shafiyur-Rahman Al-Mubarakfury*).

Pemahaman akan sejarah di masa Rasulullah SAW tentang

bagaimana mengatur dan membina keberagaman di negara Madinah, maupun sejarah perkembangan Syariat Islam di Aceh, dapat menghilangkan kecemasan, keraguan dan ketakutan terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh. Bahkan dengan bersyariat ada jaminan yang pasti; terciptanya kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. (QS: 4:28, 17:15).

Sudah saatnya seluruh simpul kekuatan yang ada dalam masyarakat bersatu padu mewujudkan Aceh yang bersyariat, melalui sosialisasi yang menyeluruh dan merata, serta membangun “pemerintahan” yang konsen dengan Syariat. Sebab konsep yang benar memerlukan pelaksanaan-pelaksana yang benar pula.

Tanpa usaha yang terencana, sistimatis dan terukur dalam mewujudkan pemerintahan (eksekutif dan yudikatif) yang bersih dan kapabel, serta punya keberpihakan kepada Syariat, maka keinginan dan cita-cita besar untuk mewujudkan Aceh yang bersyariat, maju dan bermartabat hanya menjadi angan-angan belaka. *Al-lahu’alam.* ■

Pemulis: Pengasah Pondok Pesantren Hidayatullah, Lhokngae Aceh Besar dan Sekretaris DPW Hidayatullah NAD

>> KANDIDAT



M Nasir Djamil (Kandidat Wagub Aceh)

Butuh Kekuasaan Melakukan Perubahan

Muhammad Azami

Banda Aceh
Muhammad2004@yahoo.com

Saat menjadi anggota DPRD NAD periode 1999-2004, Nasir—begitu pria ini kerap disapa—tergolong vokal. Pandangannya terhadap berbagai persoalan Aceh kerap menghiasi berbagai media masa. Saat itu Nasir tergolong populer, hingga pada 5 April 2004 terpilih sebagai anggota DPR pusat mewakili Nanggroe Aceh Darussalam.

Dan pada Juli lalu, pria ini memastikan diri untuk maju sebagai Cawagub (Calon Wakil Gubernur) dari PKS bergandengan dengan Azwar Abubakar sebagai Cagub dari PAN. Pekan lalu, *Ceureumén* mewawancarai mantan wartawan ini.

Mengapa Anda memilih mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Aceh?

PKS tidak cukup kursi untuk bisa maju sebagai gubernur. Yang kedua, PKS juga harus merelakan kursi di nomor dua, mengingat kebutuhan logistik yang sulit untuk dipenuhi guna mencukupi 21 kabupaten/kota. Tetapi, yang pa-

ling utama adalah memang PKS tidak cukup kursi untuk bisa maju sebagai nomor satu.

Lalu, mengapa Anda memilih Azwar Abubakar sebagai Cagub yang akan berpasangan dengan Anda?

Pertama, Pak Azwar itu kader PAN. Ini berbeda dengan yang lainnya. Banyak calon yang maju lainnya yang maju melalui partai X misalnya, bukanlah berasal dari partai yang bersangkutan. Hampir semua kandidat bukan kader asli partai. Hanya Pak Azwar yang satu-satunya kader dari Partai Amanat Nasional, sementara saya juga kader dari PKS.

Yang kedua, karena Pak Azwar pernah menjadi Wakil Gubernur dan menjadi Pelaksana Tugas Gubernur, maka mungkin ia akan lebih dikenal oleh rakyat di Nanggroe Aceh Darussalam. Dan dalam Pilkada, sebenarnya faktor dikenal itu merupakan faktor yang paling penting untuk menjual sang calon.

Kabarnya PAN harus membayar sampai Rp 5 miliar untuk mendapatkan Anda dari PKS?

Sebenarnya tidak ada yang dibayar dan tidak ada yang membayar. Yang kedua ini adalah se-



■ HOTEL SIBANGUNYAK

M Nasir Djamil

buaah kesepakatan antara kedua pihak, PKS dengan PAN, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di lapangan, yaitu kebutuhan-kebutuhan logistik, kebutu-

han-kebutuhan yang sifatnya teknis, dan kebutuhan-kebutuhan yang menyentuh sumber daya manusia di lapangan.

Jadi, sekali lagi, tidak ada pihak yang dibayar atau pihak yang membayar. Yang ada hanyalah kesepakatan yang disepakati oleh kedua pihak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Tentu saja kebutuhan di lapangan itu mensyaratkan adanya kebutuhan dana yang mencukupi.

Apa yang Anda lakukan kalau terpilih sebagai Wakil Gubernur Aceh?

Yang pertama sekali adalah bagaimana membangun kebersamaan antara gubernur dan wakil gubernur. Kemudian, menunjukkan keteladanan kepada rakyat Aceh. Lalu, melakukan reformasi birokrasi. Sebab, mesin biro-

krasi di Aceh harus bisa bekerja dengan cepat dan tepat guna memenuhi hak-hak dasar rakyat di Nanggroe Aceh Darussalam.

Itu merupakan yang utama harus dilakukan. Program-program pembangunan akan bisa berjalan kalau mesin birokrasi itu menjadi sebuah mesin yang tangguh, mesin yang kuat, dan mesin yang bebas dari kotoran.

Jadi, program pengentasan kemiskinan, pembangunan, dan segala macam, itu tidak akan berarti dan berjalan dengan baik kalau mesin birokrasi tidak tangguh, tidak kuat, atau mesin birokrasi itu banyak kotorannya.

Oleh karena itu, disamping membangun kekompakan antara gubernur dan wakil gubernur juga mewujudkan keteladanan dan mereformasi birokrasi di Aceh. Kekompakan antara gubernur dan wakil gubernur itu penting. Dalam sejarah pemerintahan, jarang sekali terjadi kekompakan antara orang nomor satu dan orang nomor dua. Oleh karena itu, ini harus menjadi komitmen bersama. Karena itulah, Azwar-Nasir itu menjadi dwitunggal, yang satu sama lain saling membutuhkan. ■

Nama Lengkap: M Nasir Djamil S. Ag
Tanggal Lahir: 22 Januari 1970
Pendidikan: Sarjana Agama IAIN Ar-Raniry
Pekerjaan: Anggota DPR RI

Andakah Korban Konflik?

Mohammad Avicena

Banda Aceh
sjechsyoh@yahoo.com

Bantuan Reintegrasi berbasis masyarakat bagi korban konflik di antaranya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha-usaha perekonomian atau kegiatan-kegiatan yang meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberian modal usaha dan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, guna meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas yang dapat membantu upaya perdamaian dan rekonstruksi, dan mempromosikan dan memadukan budaya damai di pedesaan serta mengembangkan dan memperkuat lembaga-lembaga desa.

Lalu, apakah Anda tahu bagaimana kriteria yang dimaksud dengan korban konflik?

Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) mengeluarkan patokannya sebagai berikut:

1. Orang yang meninggal dunia karena konflik

Orang yang meninggal dunia sebagai akibat tindakan salah satu pihak yang bertikai atau oleh orang yang tidak dikenal selama konflik berlangsung

2. Orang yang hilang karena konflik

Orang yang diduga kuat telah hilang selama konflik berlangsung dan tidak ada informasi tentang keberadaan orang tersebut sampai dengan saat ini

3. Ahli waris dari yang meninggal dunia/hilang karena konflik

Salah seorang yang secara hukum merupakan ahli waris yang terdekat dari orang yang meninggal dunia atau hilang karena konflik berlangsung

4. Pemilik rumah yang dibakar/hancur karena konflik

Orang yang rumah/tempat tinggalnya dibakar/hancur sebagai akibat tindakan salah satu pihak yang bertikai atau oleh orang yang tidak dikenal selama

konflik berlangsung sehingga rumah/tempat tinggalnya tidak dapat ditempati lagi pada saat itu dan belum pernah mendapat paket bantuan rumah atau bantuan perbaikan rumah secara resmi

5. Pemilik harta lainnya (selain rumah) yg rusak/dibakar/hancur hilang karena konflik

Akan ditentukan kemudian oleh suatu Komisi Bersama Penyelesaian Klaim

6. Keluarga yang mengungsi karena konflik

Orang-orang yang selama konflik berlangsung satu keluarganya (bukan sebagian anggota keluarga) pernah harus mengosongkan tempat tinggalnya dan pindah ke tempat lain secara permanen minimal selama 1 bulan. Dalam hal terjadi penambahan jumlah kepala keluarga selama dalam pengungsian, yang diakui adalah jumlah kepala keluarga pada saat awal mengungsi

7. Orang yang cacat atau kehilangan anggota tubuh karena konflik

Orang yang akibat konflik menjadi cacat atau kehilangan sebagian anggota tubuhnya sehingga anggota tubuh tersebut tidak berfungsi normal secara permanen

8. Orang yang sakit mental karena konflik

Orang yang sampai saat ini masih menderita sakit/cacat mental yang diakibatkan oleh konflik.

9. Orang yang sakit fisik karena konflik

Orang yang akibat konflik menjadi sakit sehingga anggota tubuh tersebut tidak berfungsi normal (masih sakit) sampai dengan saat ini.

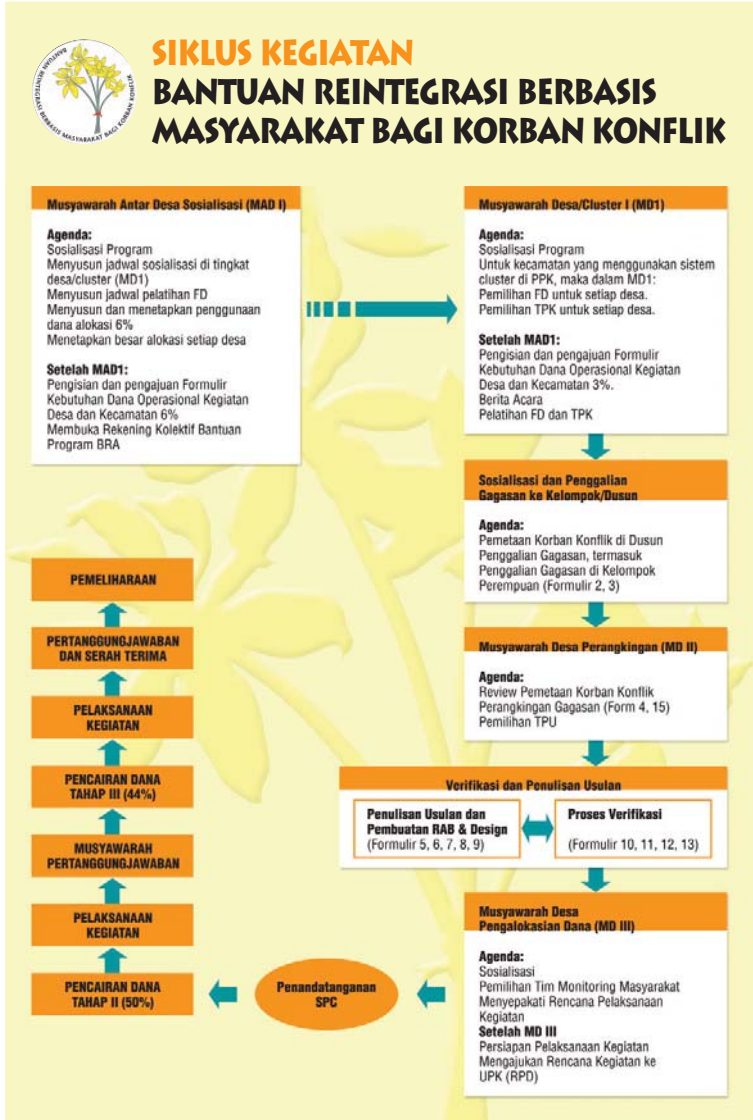
Untuk orang yang telah mengeluarkan biaya pengobatan sendiri dan telah sembuh, akan diselesaikan melalui Komisi Bersama Penyelesaian Klaim.

10. Orang yang hilang mata pencaharian pokok karena konflik

Orang yang akibat konflik tidak dapat meneruskan mata pencaharian pokoknya seperti semula dan sampai saat ini tidak dapat membiayai hidupnya secara normal.



Seorang ibu korban konflik sedang menyuapi anaknya makan nasi bungkus, saat berdemonstrasi menuntut dana bagi korban konflik di kantor BRA Banda Aceh



Puluhan wanita korban konflik sedang berkumpul, saat melakukan aksi demo menuntut dana bagi korban konflik di kantor BRA, Banda Aceh.